

Adaptasi Pemerintahan Obama terhadap Negara-negara Besar terkait Kasus Nuklir Iran

Elvina Yudith

Departemen Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Email :elvinayudith@gmail.com

Abstract

Until the Bush Administration, US continued to use coercive and unilateral approach in response to Iran's nuclear case. Nevertheless, the approach can not be said as successful since Iran's nuclear program keeps ongoing despite the continuing sanctions. On the other hand, the major powers other than the US in the P5+1, which are Britain, France, Germany, Russia and China, are experiencing dynamics related to Iran's nuclear case which leads them to the same position, which is to consider multilateral negotiations as the best way to resolve Iran nuclear issue. Considering that US sanctions and unilateral approaches are no longer reliable for resolving Iran's nuclear case, the Obama Administration was then adapting to a cooperative and multilateral approach which is done by other P5+1 nations. The Obama administration supports multilateral negotiations, until finally JPOA agreement is reached.

Kata Kunci: *Obama Administration, Iran Nuclear Issue, P5+1.*

Pendahuluan

Sejak tahun 1979, hubungan antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran menjadi buruk akibat Revolusi Iran dan proklamasi Iran sebagai negara Islam Syiah yang menolak AS. Ayatollah Khomeini, yang kemudian menjabat sebagai Pemimpin Agung Iran pasca revolusi, mendukung kelompok-kelompok yang hendak melakukan Revolusi Islam di seluruh dunia serta memiliki ideologi anti-populisme AS dan otonomi nasional yang melawan globalisasi (Cole 2009). Pemikiran Khomeini memengaruhi relasi Iran dengan AS karena ide-ide tersebut secara langsung menentang idealisme AS. Tidak hanya itu, revolusi langsung diikuti dengan penyerangan terhadap Kedutaan Besar AS di Iran dan penyanderaan warga negara AS di Teheran oleh sekelompok mahasiswa Iran (Houghton 2004). Hal ini menjadi penyebab sanksi pertama yang

dijatuhkan oleh AS untuk Iran, yaitu larangan untuk mengimpor minyak Iran dan pembekuan aset-aset Iran yang berada di bank milik AS sejumlah 12 miliar dolar AS (Clawson 2016). Sejak saat itu pula, Kedutaan Besar AS di Teheran ditutup dan perwakilan diplomatik AS di Iran direpresentasikan oleh Kedutaan Besar Swiss (Heilprin 2016). Tidak hanya itu, kasus nuklir Iran menambah gesekan dalam relasi kedua negara. Ambisi Iran untuk mendapatkan senjata nuklir menimbulkan kecurigaan dan kekhawatiran negara-negara, termasuk AS. Pada tahun 1992, Kongres AS menyetujui Iran-Iraq Arms Nonproliferation Act yang melarang entitas dan individu membantu Iran, baik untuk mengembangkan maupun untuk mendapatkan senjata konvensional, seperti senjata kimiawi, biologis, dan nuklir (Laub 2015). Empat tahun kemudian, Pemerintahan Clinton mengeluarkan Iran-Libya Sanctions Act (ILSA). ILSA menyatakan bahwa pihak-pihak luar negeri yang melakukan

investasi sebesar lebih dari 20 juta dolar AS di sektor energi Iran akan mendapatkan sanksi (Katzman 2007). Presiden Clinton juga memberikan pernyataan bahwa Iran dan Libya adalah dua negara pendukung terorisme paling berbahaya di dunia (DelViscio *et al.* 2012).

Tegangan dalam hubungan AS-Iran akibat kasus nuklir pasca kejadian 9/11 terus berlanjut dan bertambah. Pada tanggal 14 Agustus 2002, kelompok oposisi Iran yang bernama National Council of Resistance of Iran (NCRI) mengungkapkan keberadaan fasilitas pengayaan nuklir Natanz Enrichment Complex dan pabrik produksi air berat di Arak, serta berbagai nama individu dan perusahaan yang terlibat dalam program nuklir.

Usaha Iran untuk mencapai kapabilitas senjata nuklir yang ditutupi dengan program-program nuklir sipil bahkan dinyatakan oleh NCRI telah berlangsung selama hampir 20 tahun (Ogilvie-White 2007). Tidak hanya itu, pada tahun 2007, badan intelijen AS melalui penyusupan ke dalam sistem komputer Iran menemukan bahwa Iran telah membuat desain perang nuklir (Sanger & Broad 2009). Pada tanggal 21 September 2009, Iran mengungkapkan keberadaan fasilitas pengayaan uranium bernama Fordow Fuel Enrichment Plant (FFEP) yang terletak di kompleks terowongan bawah tanah di dekat Qom. Meskipun Iran mengungkapkan bahwa FFEP digunakan untuk kepentingan program nuklir damai berupa pembangkitan listrik negara, ukuran pabrik, kerahasiaan, dan letak dari FFEP membuat Washington curiga bahwa FFEP digunakan untuk memproduksi *highly enriched uranium* (HEU) sebagai bahan senjata nuklir.

Pendekatan AS terhadap Iran sebelum Masa Pemerintahan Obama

Sebelum masa Pemerintahan Obama, AS selalu menggunakan pendekatan yang konfliktif dan bertindak secara unilateral dalam menangani kasus nuklir Iran. AS terus menetapkan berbagai macam sanksi yang membatasi

interaksi politik, ekonomi, dan diplomatik Iran. Rezim sanksi Iran yang dibangun oleh AS bahkan merupakan salah satu rezim sanksi paling keras di dunia (O'Sullivan

2010). Penegakan sanksi tersebut tidak lepas dari pandangan bahwa AS memiliki peran sebagai satu-satunya *global superpower*. Pemerintahan Bush, misalnya, meyakini bahwa AS adalah pemimpin dalam unipolaritas sehingga AS memiliki kebebasan untuk

melakukan apa pun yang diinginkan (van den Bergh 2009). Tidak hanya mengagungkan unipolaritas dan kepemimpinan AS, Pemerintahan Bush juga menganggap bahwa negara-negara besar memiliki posisi yang sepihak dengan AS.

Di sisi lain, pandangan bahwa AS masih menjadi satu-satunya *superpower* global dan menjadi pemimpin negara-negara dunia tersebut justru seharusnya dinilai kembali. Termasuk dalam hal rezim sanksi Iran, negara-negara besar maupun negara-negara aliansi AS tidak selalu sependapat, bahkan justru menentang penilaian dan keputusan AS. Negara-negara besar lain beberapa kali justru merasa dirugikan akibat sanksi AS terhadap Iran. Misalnya, pada tahun 1996, ILSA yang mengancam pihak ketiga menimbulkan penolakan dari negara-negara aliansi AS, serta dinilai sebagai sebuah kebijakan yang tidak tepat. Tidak hanya kebijakan-kebijakan tersebut tidak efektif karena Iran tetap tidak ingin memproses perjanjian damai, kebijakan AS telah menghilangkan kepercayaan negara aliansi terhadap AS.

Di sisi lain, pandangan bahwa AS masih menjadi satu-satunya *superpower* global dan menjadi pemimpin negara-negara dunia tersebut justru seharusnya dinilai kembali.

Efektivitas rezim sanksi yang selama ini dilakukan oleh AS pun perlu dinilai kembali. Rezim sanksi sebagai hasil dari banyak pembuat kebijakan, baik kongres, badan eksekutif, maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan waktu yang lama, tidak hanya dalam hitungan bulan, namun juga tahun, menyebabkan implementasi sanksi seringkali memiliki tujuan yang tidak jelas. Rezim sanksi bahkan dapat berulang, tumpang tindih, maupun kontradiktif antara satu dengan yang lain karena rentang waktu yang panjang sejak pertama kali sanksi diberikan (O'Sullivan 2010). Hal ini menjadi salah satu faktor pencapaian hasil yang tidak signifikan sanksi terhadap Iran yang tidak terbukti mampu membatasi Iran dalam pengembangan nuklir, melainkan perkembangan tahun justru disertai dengan perkembangan program nuklir Iran yang semakin pesat (Fathollah-Nejad 2014).

Tidak hanya itu, Pemerintahan Bush juga telah mengabaikan, bahkan merusak, kerja sama keamanan (van den Bergh 2009). Beberapa contoh adalah ketika Pemerintahan Bush menarik keanggotaan AS dari ABMT dan menolak untuk meratifikasi Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT). Pemerintahan Bush juga tidak berinisiatif untuk memulai negosiasi dalam kasus proliferasi nuklir, seperti yang seharusnya dilakukan menurut Pasal VI dalam NPT (Department for Disarmament Affairs 2000). Menurut Lindsay (2011), para pemimpin negara aliansi pada akhirnya semakin menjauhi AS karena kebijakan-kebijakan Bush tersebut. Sesuai dengan pernyataan Brzenzinski *et al.* (1997), sanksi-sanksi yang semakin keras dari AS bagi Iran tidak memberikan progres yang signifikan, melainkan justru lebih mengisolasi AS daripada Iran. Meskipun mendapatkan kritik dari negara-negara besar maupun negara-negara aliansi serta tidak terbukti efektif untuk menghentikan program nuklir Iran, AS hingga masa Pemerintahan Bush masih tetap menggunakan pendekatan yang

sama terhadap Iran, yaitu secara koersif memberikan berbagai sanksi.

Dinamika Negara-negara Besar terkait Isu Nuklir Iran

Berbeda dengan AS yang melakukan isolasi terhadap Iran sebagai tanggapan atas program pengembangan nuklir Iran, Inggris, Perancis, dan Jerman atau negara-negara EU-3 menanggapi ancaman dari program nuklir Iran dengan melakukan penjangkauan melalui dialog-dialog multilateral dan negosiasi untuk membangun kerja sama perdagangan, dengan pembahasan mengenai isu WMD dan kerja sama di bidang energi, perdagangan, serta investasi (Dryburgh 2008). Di sisi lain, Rusia justru terbuka dalam hal kerja sama di bidang energi nuklir dengan Iran dan tidak memandang program nuklir Iran sebagai ancaman. Salah satu bentuk kerja sama Rusia-Iran adalah penandatanganan kontrak antara perusahaan Rusia, Zarubezhatomenergostroi, dan Iran's Atomic Energy Organization pada tanggal 8 Januari 1995 untuk membangun pembangkit tenaga nuklir di Bushehr (Orlov & Vinnikov 2005). Tiongkok pun memiliki posisi yang sama dengan Rusia, yakni tidak memandang program nuklir Iran sebagai ancaman. Tiongkok justru memiliki keyakinan bahwa Iran tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membangun senjata nuklir dalam waktu singkat (International Crisis Group 2010). Tiongkok juga mendukung program nuklir damai Iran dan menentang penggunaan alasan non-proliferasi untuk membatasi hak Iran tersebut. Kerja sama Tiongkok-Iran sendiri telah dimulai sejak tahun 1987 dan berlangsung selama kurang lebih sepuluh tahun, yang mana dalam kerja sama tersebut Tiongkok memfasilitasi Iran dengan ahli-ahli pertambangan uranium dan desain pembangunan pabrik uranium heksafluorida (Lake 2011).

Adapun pengungkapan pelanggaran Iran terkait pengembangan nuklir

kemudian memberikan pengaruh terhadap kebijakan dari kelima negara besar tersebut, salah satunya adalah pengungkapan fasilitas pengayaan nuklir di Natanz dan Arak pada tahun 2002. Konstruksi di Natanz menunjukkan bahwa perkembangan nuklir Iran telah mencapai tingkat progres tinggi yang tidak diduga sebelumnya, terutama oleh negara-negara Barat maupun Rusia. Rusia, yang beranggapan bahwa Iran seharusnya memberikan informasi menyeluruh mengenai program nuklir yang sedang dilakukan, kemudian mulai melakukan penentangan terhadap program nuklir Iran, baik melalui konsensus internasional maupun pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Rusia (Orlov & Vinnikov 2005). Pada tahun 2003, Putin menyebutkan bahwa kebijakan luar negeri terhadap Iran akan mengutamakan non-proliferasi di atas kooperasi, dengan pertimbangan bahwa persebaran WMD adalah salah satu masalah utama yang harus dihadapi dunia saat ini. Rusia tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kerja sama dengan Iran, namun kepatuhan Iran pada IAEA dan transparansi nuklir akan menjadi syarat kerja sama tersebut.

Meskipun Tiongkok mengakui hak Iran untuk mengembangkan nuklir bagi kepentingan sipil, Tiongkok tetap berada pada posisi menolak negara Iran yang bersenjata nuklir. Hal ini dilakukan Tiongkok sebagai bentuk dukungan terhadap rezim non-proliferasi nuklir dan pengakuan terhadap otoritas IAEA, serta anggapan bahwa kemunculan negara senjata nuklir baru dapat mengganggu *balance of power* dan menimbulkan risiko negara baru tersebut tidak bertanggung jawab secara politik maupun teknis saat mengembangkan senjata nuklir (International Crisis Group 2010). Meskipun demikian, Tiongkok menolak

Meskipun Tiongkok mengakui hak Iran untuk mengembangkan nuklir bagi kepentingan sipil, Tiongkok tetap berada pada posisi menolak negara Iran yang bersenjata nuklir.

penggunaan sanksi sebagai cara untuk menangani kasus nuklir Iran. Alasan pertama dari penentangan tersebut adalah karena Tiongkok menganggap bahwa sanksi tidak dapat menyelesaikan masalah nuklir Iran, namun justru mengakibatkan konsekuensi humaniter bagi rakyat sipil, mempersulit negosiasi, sekaligus tidak efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Chin & Thakur 2010). Alasan yang kedua adalah karena pemberian sanksi menyalahi prinsip non-interferensi Tiongkok yang terdapat dalam "Five Principles of Peaceful Co-existence" (和平共处五项原则) (International Crisis Group 2010). Tiongkok lebih setuju dengan penggunaan insentif sebagai penyelesaian yang bersifat damai untuk mengatasi krisis nuklir (Park & Glenn 2015).

Sementara itu, Inggris, Perancis, dan Jerman menanggapi pengungkapan fasilitas pengayaan nuklir Natanz dengan lebih giat menjalankan strategi pendekatan aktif. Pada tahun 2003, setelah Iran ditetapkan tidak mematuhi NPT Safeguard Agreement oleh IAEA, Inggris, Perancis, dan Jerman melakukan inisiasi negosiasi dengan Iran dengan mengirimkan Menteri Luar Negeri ketiga negara menuju Teheran. Setelah negosiasi berjalan selama beberapa bulan, EU-3 dan Iran berhasil mencapai Paris Agreement pada tanggal 15 November 2004. Dalam Paris Agreement, Iran menyetujui untuk menghentikan aktivitas pengolahan maupun pengayaan dan memberikan akses pada IAEA untuk melakukan verifikasi terhadap penghentian tersebut, dimulai pada tanggal 22 November 2004 hingga keempat pihak mencapai persetujuan jangka panjang. Apabila penghentian program nuklir telah dikonfirmasi, EU-3 akan kembali melanjutkan negosiasi Trade and

Cooperation Agreement (TCA) yang sebelumnya dihentikan karena pengungkapan program nuklir Iran di Natanz pada tahun 2002, mengakui hak Iran untuk melaksanakan program nuklir damai, tidak menghalangi kontrak Bushehr antara Rusia-Iran maupun pembangunan reaktor penelitian nuklir air ringan, menjamin akses Iran untuk mendapatkan teknologi nuklir maupun bahan bakar untuk pembangkit nuklir dengan harga pasar, mendukung keanggotaan Iran dalam WTO, melakukan kerja sama dalam sektor ekonomi, serta melakukan dialog mengenai isu-isu keamanan Iran (Orlov & Vinnikov 2005).

Keberhasilan Inggris, Perancis, dan Jerman dalam melakukan negosiasi dengan Iran yang tercermin dalam tercapainya Paris Agreement turut memengaruhi perspektif Rusia dan Tiongkok dalam hal penanganan kasus nuklir Iran. Pada bulan November 2004, Putin menyatakan bahwa Rusia mendukung internasionalisasi isu nuklir Iran karena kesuksesan Paris Agreement (Orlov & Vinnikov 2005). Rusia menganggap bahwa perjanjian tersebut berhasil menjadi alternatif yang mampu mengontrol ambisi Iran terhadap nuklir. Rusia juga mendorong pembuatan konsorsium internasional untuk menyelesaikan isu nuklir Iran yang terdiri dari Rusia, Uni Eropa, dan AS. Tiongkok sendiri menggunakan strategi *delay-and-weaken* dalam menanggapi kasus Iran. Strategi Tiongkok tersebut dijalankan dengan berusaha menunda dan memperlemah sanksi terhadap Iran, dan dengan saat yang bersamaan berusaha mengarahkan penyelesaian masalah melalui negosiasi dan perjanjian (International Crisis Group 2010).

Meskipun demikian, AS hingga masa Pemerintahan Bush tidak memberikan respon yang positif terhadap pendekatan multilateral yang digunakan oleh negara-negara besar lain untuk menyelesaikan krisis nuklir Iran. Pada tahun 2003, Pemerintahan Bush menolak untuk tergabung ke dalam

pembicaraan antara negara-negara EU-3 dan Iran (Lyons 2015). Ketika Paris Agreement tercapai dan negara-negara besar lain memfokuskan negosiasi multilateral sebagai strategi untuk menyelesaikan permasalahan nuklir Iran, Bush justru bersikap skeptis terhadap keberhasilan perjanjian tersebut (Crail & Sobrado 2004). Meskipun pada tahun 2006 AS bergabung dalam pembicaraan negara-negara P5+1, yaitu bersama Inggris, Perancis, Jerman, Rusia, dan Tiongkok, dengan Iran sejak tahun 2006, AS terus menggunakan sanksi dan mensyaratkan Iran untuk lebih dulu menghentikan program nuklir sebelum persetujuan dapat terlaksana.

Adaptasi Pemerintahan Obama terhadap Pendekatan Negara-negara Besar

Pada tanggal 10 Februari 2011, Intelligence Community di bawah kepemimpinan James R. Clapper menerbitkan *Worldwide Threat Assessment* yang merupakan rangkaian ancaman dari berbagai aspek di seluruh dunia yang secara signifikan memengaruhi kepentingan AS atau berada dalam kepentingan AS. Melalui *Worldwide Threat Assessment*, Clapper menyatakan bahwa Iran telah mencapai tingkat kemampuan yang cukup untuk membangun senjata nuklir dalam beberapa tahun ke depan (Clapper 2011). Iran terutama ahli dalam hal pengayaan uranium. Perkembangan fasilitas pengayaan uranium Iran pun pesat, terlihat dari peningkatan jumlah fasilitas pengayaan uranium yang telah terpasang mencapai angka 3.000 pada tahun 2007 dan 8.000 pada tahun 2011. Sementara itu, fasilitas pengayaan uranium yang beroperasi mencapai angka 3.000 pada tahun 2007 dan 4.800 pada tahun 2010. Rincian ancaman keamanan nasional AS yang terdapat dalam *Worldwide Threat Assessment* tersebut menunjukkan bahwa hingga kurang lebih dua tahun setelah Obama memerintah, proliferasi senjata nuklir khususnya kasus nuklir Iran masih belum terselesaikan

meskipun AS telah terlibat dalam negosiasi multilateral bersama negara-negara P5+1 dengan Iran sejak tahun 2006. Bahkan, perkembangan program nuklir Iran semakin pesat meskipun AS telah memberikan berbagai macam sanksi yang membatasi Iran di berbagai sektor

perekonomian. Peningkatan sanksi tidak selaras dengan penurunan komitmen Iran untuk mengembangkan nuklir yang berisiko menjadi sarana untuk membangun senjata nuklir.

Sesuai dengan pernyataan Brzezinski *et al.* (1997), AS harus mengakui bahwa usaha untuk mengisolasi Iran secara unilateral menghabiskan banyak biaya, tidak efektif, sekaligus tidak mendapat cukup dukungan dari aliansi AS. Mempertahankan

pendekatan yang konfliktif dan permusuhan dengan Iran justru dapat merugikan AS. Jika AS memutuskan untuk melakukan serangan militer terhadap fasilitas pengembangan nuklir Iran akibat dampak sanksi yang tidak signifikan, AS tidak hanya berisiko mendapatkan penolakan dan memperburuk relasi dengan anggota Dewan Keamanan PBB, melainkan juga meningkatkan tekad Iran untuk mendapatkan senjata nuklir (The Economist 2015). Di sisi lain, apabila AS memilih untuk terus memperpanjang sanksi, AS tidak dapat mencapai hasil yang signifikan maupun memastikan bahwa program nuklir yang dikembangkan oleh Iran benar-benar digunakan untuk kepentingan sipil. Bahkan, terdapat kemungkinan bahwa ketika AS tidak melakukan apa pun dan menunggu Iran untuk menyerah, situasi justru bertambah parah seperti ketika Pemerintahan Bush mengabaikan sinyal positif dari Iran dan berujung pada peningkatan jumlah fasilitas pengayaan nuklir hingga 100 kali lipat (The Economist 2015). Melalui Paris Agreement, negara-negara EU-3 menunjukkan bahwa penghentian

sementara dari pengayaan uranium dan pemeriksaan IAEA secara lebih intrusif adalah hal yang mungkin dicapai apabila langkah awal untuk bernegosiasi dengan Iran telah dilakukan.

Pemerintahan Obama pun kemudian mengadaptasi pendekatan kooperatif dan multilateral yang dilakukan oleh negara-negara P5+1 lain sebagai cara untuk menyelesaikan kasus nuklir Iran. Hal ini didasarkan pada situasi yang menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri yang agresif dan sepihak tidak lagi dapat diandalkan untuk mencapai tujuan AS dalam menghindari proliferasi senjata nuklir di Iran. Sesuai dengan pernyataan Lindsay (2011), kebijakan luar negeri AS

harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan global. Perubahan pendekatan pada Pemerintahan Obama ini terlihat melalui pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh anggota-anggota National Security Council (NSC) sebagai pembuat kebijakan luar negeri, yang mana dalam penelitian ini direpresentasikan oleh enam anggota NSC (Pickering 2000), yaitu Presiden, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Penasihat Keamanan Nasional, Ketua Staf Kepala Gabungan, dan Ketua Intelligence Community.

Obama menerima fakta bahwa globalisasi menyebabkan perubahan terhadap politik dunia. Dalam dunia yang semakin mengglobal, masalah-masalah lintas batas seperti terorisme mulai bermunculan. Adapun cara yang digunakan oleh Obama untuk menghadapi masalah-masalah tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan multilateral, tercermin dalam pernyataan Obama, "America cannot meet the threats of this century alone" (Obama 2007), yang menunjukkan pandangan Obama bahwa

Obama menerima fakta bahwa globalisasi menyebabkan perubahan terhadap politik dunia. Dalam dunia yang semakin mengglobal, masalah-masalah lintas batas seperti terorisme mulai bermunculan.

AS membutuhkan kerja sama dengan negara-negara lain untuk menyelesaikan permasalahan global. Obama, ketika masih menjabat sebagai Senator, memberikan pernyataan pada tanggal 15 Juli 2008:

“... As long as nuclear weapons exist, we must retain a strong deterrent. But instead of threatening to kick them out of the G8, we need to work with Russia to take U.S. and Russian ballistic missiles off hair-trigger alert; to dramatically reduce the stockpiles of our nuclear weapons and material; to seek a global ban on the production of fissile material for weapons; and to expand the U.S.-Russian ban on intermediate-range missiles so that the agreement is global. By keeping our commitment under the Nonproliferation Treaty, we'll be in a better position to press nations like North Korea and Iran to keep theirs. In particular, it will give us more credibility and leverage in dealing with Iran.” (Council on Foreign Relations 2009)

Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Obama memiliki tujuan untuk mencapai sebuah *zero nuclear world*. Namun, tidak hanya mengungkapkan visi Obama mengenai dunia dalam tatanan nuklir yang baru, pernyataan tersebut juga mengungkapkan bahwa cara yang akan digunakan oleh Obama adalah melalui kooperasi. Tidak hanya bekerja sama dengan Rusia, Obama juga menyebutkan pentingnya menjaga perjanjian internasional seperti NPT dan bernegosiasi untuk menyelesaikan kasus-kasus nuklir, termasuk kasus nuklir Iran. selain itu, Obama melakukan pendekatan kepada Iran seperti dengan mengirimkan pesan ketika Tahun Baru Iran melalui video, yang menyatakan:

“... I have offered the Iranian government an opportunity—if it meets

its international obligations, then there could be a new relationship between our two countries, and Iran could begin to return to its rightful place among the community of nations ... As I've said all along, the United States prefers to resolve this matter peacefully, diplomatically.” (The White House 2013b)

Melalui video tersebut, Obama menunjukkan bahwa AS hendak menyelesaikan masalah dengan Iran menggunakan diplomasi dan dengan solusi yang damai, bahkan tidak mustahil bahwa AS dan Iran dapat memiliki relasi yang baik. AS juga mengakui hak Iran untuk mengembangkan program nuklir damai.

Selain itu, Obama menegaskan bahwa AS tidak bertujuan untuk melengserkan rezim Iran dengan menyebut *Islamic Republic* beberapa kali, menunjukkan pengakuan AS terhadap rezim yang berlaku di Iran (Pierce 2016).

Menteri Luar Negeri pada masa Pemerintahan Obama, yaitu Hillary Clinton dan John F. Kerry, pun mendukung mendukung pelaksanaan diplomasi dengan Iran untuk

menyelesaikan masalah nuklir. Clinton sendiri pernah menyatakan kebanggaan atas apa yang telah dilakukan ketika menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, yaitu mendorong diplomasi dan negosiasi dengan Iran (Toosi & Crowley 2015). Hal ini terbukti ketika Clinton, pada masa kepresidenan Obama yang pertama, mengungkapkan di depan Senat bahwa dirinya dan Obama berkomitmen untuk memulai hubungan yang baru dengan Iran, yakni dengan lebih banyak melibatkan diskusi. Bahkan, Clinton juga menyatakan bahwa memungkinkan bagi AS untuk membuka kantor perwakilan diplomatik di Iran untuk pertama kalinya setelah Revolusi 1979 (Pierce 2016). Dalam melakukan negosiasi dan mewujudkan

Obama menegaskan bahwa AS tidak bertujuan untuk melengserkan rezim Iran dengan menyebut *Islamic Republic* beberapa kali, menunjukkan pengakuan AS terhadap rezim yang berlaku di Iran

kerja sama, Clinton menekankan pentingnya transparansi oleh Iran mengenai program nuklirnya: "There needs to be full transparency, disclosure, and verifiable inspections going forward, and certainly any part of the Iranian nuclear or military establishment that has anything to do with the program past, present, and future, needs to be subject to that," (Toosi & Crowley 2015). Sebagai Menteri Luar Negeri pada masa kepresidenan Obama yang kedua, Kerry pun melanjutkan usaha penjangkauan dan pendekatan yang kooperatif terhadap Iran. Dalam bukunya yang berjudul *The New War: The Web of Crime that Threatens America's Security*, Kerry mengungkapkan bahwa dua dari lima ancaman utama dari keamanan nasional AS adalah nuklir dan proliferasi konvensional serta kriminal-kriminal baru yang mengeksploitasi situasi tersebut untuk mengancam stabilitas nasional (Kerry 1997). Dua ancaman tersebut salah satunya dapat ditemukan dalam kasus nuklir Iran, yang berusaha diselesaikan dengan cara negosiasi, salah satunya oleh Kerry. Adapun usaha berdiplomasi dengan Iran yang dilakukan oleh Clinton maupun Kerry pada masa Pemerintahan Obama sejatinya bukan yang pertama kali dilakukan oleh AS. Hanya, kedua Menteri Luar Negeri tersebut yang terus bertahan dalam menghadapi penolakan Iran maupun diskusi yang tidak mencapai persetujuan (Pierce 2016). Clinton maupun Kerry melakukan perubahan dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya dengan melakukan pendekatan yang bersifat kooperatif dengan Iran meskipun hal tersebut berarti melakukan negosiasi sebelum Iran benar-benar menghentikan program nuklir.

Menurut Carter dan Perry (2006), kemunculan ide untuk mengadakan diskusi bilateral maupun multilateral antara AS dengan Iran terkait isu nuklir turut mendapat pengaruh dari pandangan berbagai figur yang mendukung pendekatan ini. Salah satunya adalah Menteri Keamanan Chuck Hagel, yang pada tahun 2004

ketika masih menjabat sebagai Senator mengungkapkan pentingnya berdiplomasi dengan Iran untuk menemukan suatu resolusi:

"America is serious about achieving a negotiated, diplomatic solution. The continued unwillingness of the U.S. to engage Iran will make other states hesitate to support, and possibly oppose, these tougher measures... The U.S. should engage Iran directly with an agenda open to all areas of agreement and disagreement. It is only through this difficult diplomatic process that a pathway towards resolution and accommodation can be built, putting the U.S. and Iran, the Middle East and our allies in a position to defuse a potential Middle East conflagration and world calamity... The U.S., in partnership with our allies, should work towards a package of issues for discussion with Iran." (Carter & Perry 2006)

Dalam pernyataan tersebut, Hagel beberapa kali menyinggung hal kemitraan AS dengan negara-negara aliansi lain. Hagel mengungkapkan bahwa apabila AS terus membatasi diri dari diskusi maupun negosiasi dengan Iran, maka negara-negara lain akan menjadi ragu untuk mendukung tindakan AS yang selama ini terus berpusat pada sanksi. AS harus mulai terbuka dengan cara-cara berdiplomasi untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran. Hal ini sesuai dengan pernyataan Carter dan Perry (2006) bahwa AS hanya akan memperoleh dukungan dari negara lain untuk melakukan koersi terhadap Iran apabila AS telah mencoba jalan diplomasi dan gagal. Selain itu, Hagel juga mengungkapkan bahwa kemitraan AS dengan negara-negara aliansi adalah salah satu faktor penting untuk menyelesaikan isu nuklir Iran.

Penasihat Keamanan Nasional Obama yang pertama, James Jones, juga menyetujui pentingnya bekerja sama dengan negara-negara aliansi untuk menyelesaikan masalah Iran. Jones menyatakan bahwa salah satu bagian dari strategi komprehensif yang

digunakan untuk menangani program nuklir Iran adalah bergabung bersama negara-negara aliansi AS maupun mitra kerja sama lain untuk mencapai persetujuan dengan Iran (Federal News Service Washington D.C. 2009). Meskipun demikian, pandangan Jones justru tidak diteruskan oleh Tom Donilon sebagai Penasihat Keamanan Nasional Obama yang menggantikan Jones pada tahun 2010. Sebagai respon terhadap pendekatan kooperatif multilateral oleh negara-negara P5+1, Pemerintahan Obama memang telah menunjukkan persetujuan dan menyatakan bahwa AS akan berpartisipasi secara penuh dalam negosiasi antara P5+1 dengan Iran (Arms Control Association 2016). Namun, pandangan multilateral dan partisipasi dalam pendekatan yang bersifat lebih kooperatif oleh Pemerintahan Obama tidak lantas menghilangkan sanksi unilateral sebagai opsi AS untuk menanggapi krisis nuklir Iran. Donilon mengutamakan isolasi Iran melalui berbagai sanksi dan *containment* sebagai strategi untuk melawan ancaman nuklir Iran. CISADA, misalnya, merupakan sanksi pada masa Pemerintahan Obama yang mirip dengan ILSA karena memiliki target pihak ketiga yang bekerja sama dengan Iran dan dilakukan oleh AS secara unilateral. CISADA pun tidak lepas dari kritik seperti ILSA karena dianggap merugikan negara-negara lain, sekaligus dianggap sebagai penghalang terhadap konsensus internasional. Tidak hanya itu, sanksi dengan target pihak ketiga akan mempersulit AS untuk menentukan putusan sanksi apabila pihak ketiga tersebut adalah negara-negara aliansi AS. Perusahaan Pakistan, misalnya, memiliki kerja sama senilai 7 miliar dolar untuk membangun pipa gas alam. Di satu sisi, CISADA mengharuskan AS untuk memberikan sanksi terhadap Pakistan. Di sisi lain, AS membutuhkan Pakistan untuk membantu menstabilkan Afganistan. Apabila AS tidak menjatuhkan sanksi pada Pakistan, maka akan muncul persepsi bahwa peraturan yang dibuat

oleh AS adalah peraturan yang dapat dinegosiasi (O'Sullivan 2010).

Meskipun demikian, strategi isolasi unilateral tidak dapat dikatakan sukses. Donilon memang menyatakan bahwa Iran telah menjadi negara yang semakin lemah, terisolasi, rentan, dan terdiskredit. Namun, hal yang tidak diungkapkan Donilon adalah fakta bahwa Iran memiliki program nuklir yang lebih canggih dan maju untuk membangun senjata nuklir. Keputusan Pemerintahan Obama juga semakin lemah ketika terdapat tekanan internasional, serta kegagalan AS dalam membujuk Tiongkok, Rusia, dan negara-negara lain untuk mendukung langkah-langkah AS (Makovsky & Misztal 2011).

Perubahan pandangan pada Penasihat Keamanan Nasional AS kembali muncul ketika Susan Rice, Penasihat Keamanan Nasional ketiga dari Obama, mulai menjabat pada 1 Juli 2013 hingga akhir periode kepresidenan Obama. Rice beranggapan bahwa perlu terdapat perubahan dalam kebijakan luar negeri AS. Rice (2006) menyatakan bahwa berakhirnya Perang Dingin tidak menghilangkan ancaman pada keamanan nasional AS, melainkan justru mengubah natur ancaman menjadi lebih kompleks, tidak dapat diprediksi, dan asal dari ancaman tersebut semakin luas, tidak hanya dari negara lain namun juga dari para aktor transnasional. Hal inilah yang membuat Rice (2006), sejalan dengan pernyataan Obama, menyatakan bahwa AS tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada sendirian, namun membutuhkan bantuan dari negara-negara lain. Pada saat masih menjabat sebagai anggota senior Brookings Institution, Rice (2006) menulis bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintahan Bush membuat AS mendapatkan persepsi negatif dari berbagai negara, yang mana seharusnya AS justru merangkul negara-negara untuk menyelesaikan masalah-masalah transnasional bersama. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah cara kepemimpinan AS, yaitu dengan

mengusahakan kepentingan bersama dan kerja sama internasional. Termasuk dalam kasus nuklir Iran, Rice menyebutkan:

“The policy of the United States is clear: we will not allow Iran to acquire a nuclear weapon. With allies and partners, we continue to pursue a comprehensive strategy to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon, including diplomacy, pressure, and increasing sanctions. And, as the President has said, all options remain on the table.” (The White House 2013a)

Melalui pernyataan tersebut, Rice menegaskan bahwa AS tidak akan memberikan toleransi terhadap pengembangan senjata nuklir oleh Iran. Namun, strategi AS untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan cara bekerja sama dengan negara-negara aliansi, baik dalam melaksanakan diplomasi, tekanan, maupun sanksi terhadap Iran. Rice kembali menegaskan pentingnya kerja sama multilateral untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran. Selain itu, Rice juga mengungkapkan bahwa AS mendukung hak Iran untuk menggunakan nuklir dengan tujuan damai (CNN 2013). Kedua hal ini, yaitu multilateralisme dan dukungan kepada program nuklir damai Iran, merupakan posisi yang sama dari AS dengan negara-negara anggota P5+1 lain.

Clapper yang menjabat sebagai Ketua Intelligence Community pada tahun 2010 hingga Obama selesai memerintah, menilai bahwa lingkungan internasional dapat memengaruhi Iran. Pasalnya, Iran menggunakan pendekatan *cost-benefit* yang mempertimbangkan keamanan, kebanggaan, serta lingkungan politik dan keamanan internasional, ketika hendak mengambil keputusan dalam program nuklir (Clapper 2011). Maka dari itu, terdapat kesempatan bagi negara-negara lain, terutama negara-negara besar untuk melakukan negosiasi dengan Iran terkait program nuklir. Dalam hal ini, Clapper (2011)

mengungkapkan bahwa meskipun Iran akan terus resisten dengan negara-negara Barat, Iran akan mencegah penambahan sanksi dengan cara membatasi kebijakan-kebijakan yang agresif. Sementara itu, Jenderal Martin E. Dempsey, Ketua Staf Kepala Gabungan pada Pemerintahan Obama, adalah salah satu pihak yang berusaha untuk menjaga stabilitas situasi diplomasi yang dilakukan oleh negara-negara besar dengan Iran. Hal ini salah satunya dilakukan oleh Dempsey dengan melakukan persuasi pada Israel supaya tidak melakukan serangan militer pada pabrik-pabrik nuklir Iran mengingat sanksi ekonomi dan diplomasi yang sedang berlangsung mulai memberikan dampak yang positif (Sherwood & Treanor 2012).

Pendekatan kooperatif dan multilateral yang dilakukan oleh Pemerintahan Obama terkait kasus nuklir Iran tersebut juga tercermin dalam persetujuan Pemerintahan Obama terhadap pengurangan sanksi nuklir Iran dalam perjanjian Joint Plan of Action (JPOA). JPOA yang merupakan kesepakatan antara negara-negara P5+1, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Rusia, dan Tiongkok, dengan Iran meliputi persetujuan Iran untuk mengkonversi uranium yang telah dikayakan hingga 20 persen menjadi bentuk oksida dan tidak mengayakannya lebih dari 5 persen, menghentikan aktivitas di Natanz, Fordo, dan Arak, tidak membangun fasilitas pengayaan baru, menghentikan program nuklir secara sementara, serta mengizinkan International Atomic Energy Agency (IAEA) untuk melakukan pengawasan terhadap fasilitas-fasilitas pengembangan nuklir di Iran (Arms Control Association 2014). Sebagai timbal baliknya, AS sepakat untuk menghapus sebagian sanksi nuklir Iran, yaitu sanksi-sanksi pada sektor ekspor petrokimia, emas, logam mulia, industri mobil, jasa asuransi, dan jasa transportasi; tidak memberikan sanksi nuklir baru pada Iran; serta mengembalikan pendapatan Iran yang selama ini ditahan di luar negeri dalam

jumlah yang telah disepakati (EEAS 2013).

Simpulan

Pertimbangan Pemerintahan Obama bahwa kerja sama dan negosiasi multilateral merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran, dengan persetujuan pengurangan sanksi nuklir Iran dalam JPOA menjadi salah satu wujud dari pertimbangan tersebut, didasarkan pada Pemerintahan Obama yang melihat pendekatan kooperatif sebagai satu-satunya pilihan yang tepat untuk mencapai tujuan keamanan nasional. Hingga masa Pemerintahan Bush, AS tetap teguh menuntut Iran menghentikan seluruh aktivitas pengayaan uranium sebelum negosiasi menuju kesepakatan dapat dilaksanakan. Sementara itu, negara-negara P5+1 melakukan negosiasi dengan pemikiran awal bahwa keamanan internasional dapat dicapai dengan memastikan bahwa Iran tidak mengembangkan senjata nuklir secara rahasia dan bahwa waktu *breakout* atau waktu pembuatan senjata nuklir yang mampu dilakukan oleh Iran diperpanjang. Negara-negara anggota P5+1 memengaruhi perspektif Pemerintahan Obama terhadap kesepakatan, dengan pertimbangan bahwa pendekatan koersif tidak lagi dapat diandalkan untuk mengatasi masalah nuklir Iran. Pemerintahan Obama pun kemudian melakukan adaptasi terhadap perspektif dan pendekatan negara-negara P5+1 tersebut. Persetujuan Pemerintahan Obama terhadap JPOA yang mengizinkan Iran untuk mengayakan uranium hingga lima persen menunjukkan perbedaan dengan

pemerintahan-pemerintahan AS sebelumnya, yang mana Pemerintahan Obama mengakui hak Iran untuk mengembangkan nuklir demi kepentingan rakyat sipil dan tidak menuntut Iran untuk benar-benar menghentikan program nuklir.

Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa keputusan Pemerintahan Obama untuk mengadaptasi baik perspektif maupun pendekatan dari negara-negara P5+1 lain terhadap Iran merupakan sebuah keputusan yang rasional dengan pertimbangan tujuan-tujuan keamanan nasional AS. Pemerintahan Obama menganggap bahwa dengan melakukan pendekatan yang lebih kooperatif dan menyetujui JPOA, tujuan keamanan nasional AS yang selama ini belum tercapai dapat terwujud, yaitu memastikan bahwa Iran tidak mendapatkan senjata nuklir yang berisiko tersebar pada negara-negara non-nuklir lain maupun para teroris dan berisiko mengancam AS maupun aliansi AS. Maka dari itu, pembicaraan yang dengan Iran ditujukan untuk meyakinkan bahwa program nuklir Iran memang bertujuan untuk penggunaan damai bagi rakyat sipil. Hal ini dicapai melalui ketentuan penghentian pengayaan uranium hingga tahap tertentu dan transparansi program nuklir Iran, sehingga Iran tidak akan dapat membangun senjata nuklir tanpa terdeteksi (Gearan & Warrick 2013). Keputusan ini dianggap lebih menguntungkan oleh Pemerintahan Obama, dengan pemikiran yang realistis bahwa jika Iran sewaktu-waktu menghancurkan kerja sama, sanksi dapat kembali diberikan pada Iran (Gearan & Warrick 2013).

Daftar Pustaka

- [1] Cole, Juan 2009. *Engaging the Muslim World*. New York, Palgrave MacMillan.
- [2] Houghton, David Patrick 2004. *US Foreign Policy and the Iran Hostage Crisis*. Cambridge, Cambridge University Press.
- [3] Pierce, Anne R. 2016. *A Perilous Path: The Misguided Foreign Policy of Barack Obama*, Hillary Clinton, and John Kerry. New York, Post Hill Press.
- [4] Clapper, James R. 2011. Statement for the Record on the Worldwide Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community for the House Permanent Select Committee on Intelligence. Council of National Intelligence.
- [5] Council on Foreign Relations 2009. "U.S. Nuclear Weapons Policy", *Independent Task Force Report No. 62*.

- [6] Brzezinski, Zbigniew *et al.* 1997. Differentiated Containment. *Foreign Affairs*, **76** (3): 20-30.
- [7] Dryburgh, Lynne 2008. The EU as a Global Actor? EU Policy Towards Iran. *European Security*, **17** (2): 253-71.
- [8] Fathollah-Nejad, Ali 2014. Why sanctions against Iran are counterproductive: Conflict resolution and state-society relations. *International Journal*, **69** (1): 48-65.
- [9] International Crisis Group 2010. The Iran Nuclear Issue: The View from Beijing. *Asia Briefing* No. 100.
- [10] Lindsay, James M. 2011. George W. Bush, Barack Obama and the future of US global leadership. *International Affairs*, **87** (4).
- [11] O'Sullivan, Meghan L. 2010. Iran and the Great Sanctions Debate. *The Washington Quarterly*, **33** (4): 7-21.
- [12] Obama, Barack 2007. Renewing American Leadership. *Foreign Affairs*, **86** (4): 2-16.
- [13] Ogilvie-White, Tanya 2007. International Responses to Iranian Nuclear Defiance: The Non-Aligned Movement and the Issue of Non-Compliance. *The European Journal of International Law*, **18** (3): 453-76.
- [14] Orlov, Vladimir A. dan Alexander Vinnikov 2005. The great guessing game: Russia and the Iranian nuclear issue. *The Washington Quarterly*, **28** (2): 49-66.
- [15] Pickering, Thomas R. 2000. The Changing Dynamics of U.S. Foreign Policy-Making. *U.S. Foreign Policy Agenda*, **5** (1): 5-8.
- [16] van den Bergh, Godfried van Benthem 2009. The Taming of the Great Nuclear Powers. *Policy Outlook*: 1-20.
- [17] Rice, Susan 2006. "Strengthening Weak States: A 21st Century Imperative". Dipresentasikan dalam Power and Superpower: Global Leadership for the 21st Century, New York, Amerika Serikat, 5-6 Juni 2006.
- [18] Arms Control Association 2014. History of Official Proposals on the Iranian Nuclear Issue [online]. https://www.armscontrol.org/factsheets/Iran_Nuclear_Proposals [diakses 17 November 2016].
- [19] Arms Control Association 2016. Timeline of Nuclear Diplomacy With Iran [online]. <https://www.armscontrol.org/factsheet/Timeline-of-Nuclear-Diplomacy-With-Iran> [diakses 3 Oktober 2016].
- [20] Carter, Ashton B. dan William J. Perry 2006. Plan B for Iran: What If Nuclear Diplomacy Fails? [pdf]. <http://www.belfercenter.org/publication/plan-b-iran-what-if-nuclear-diplomacy-fails> [diakses 30 April 2017].
- [21] Clawson, Patrick 2015. U.S. Sanctions [online]. <http://iranprimer.usip.org/resource/us-sanctions> [diakses 2 Oktober 2016].
- [22] CNN 2013. Exclusive: U.S. National Security Advisor Dr. Susan Rice on historic contact with Iran [online]. <http://cnnpressroom.blogs.cnn.com/2013/09/29/u-s-national-security-advisor-dr-susan-rice-on-historic-contact-with-iran/> [diakses 4 April 2017].
- [23] Crail, Peter dan Maria Lorenzo Sobrado 2004. IAEA Board Welcomes EU-Iran Agreement: Is Iran Providing Assurances or Merely Providing Amusement? [online]. <http://www.nti.org/analysis/articles/board-welcomes-eu-iran-agreement/> [diakses 10 Mei 2017].
- [24] DelViscio, Jeffery *et al.* 2012. Iran, the United States and a Political Seesaw [online]. http://www.nytimes.com/interactive/2012/04/07/world/middleeast/iran-timeline.html?_r=0#/#time9_197 [diakses 10 April 2016].
- [25] EEAS 2013. Joint Plan of Action [pdf]. http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131124_03_en.pdf [diakses 10 Mei 2017].
- [26] Federal News Service Washington, D.C. 2009. General James Jones Event Transcript [online]. <http://www.atlanticcouncil.org/news/transcripts/jones-james-5-27-09-transcript> (diakses 19 Maret 2017).
- [27] Gearan, Anne dan Joby Warrick 2013. World powers reach nuclear deal with Iran to freeze its nuclear program [online]. https://www.washingtonpost.com/world/national-security/kerry-in-geneva-raising-hopes-for-historic-nuclear-deal-with-iran/2013/11/23/53e7bfe6-5430-11e3-9fe0-fd2ca728e67c_story.html?utm_term=.e86edead8476 [diakses 1 Mei 2017].
- [28] Heilprin, John 2016. Iran and the Swiss connection – a guide [online]. http://www.swissinfo.ch/eng/switzerland-iran_iran-and-the-swiss-connection---a-guide/41966946 [diakses 11 Mei 2017].
- [29] Katzman, Kenneth 2007. The Iran Sanctions Act (ISA) [pdf]. <https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf> [diakses 10 Mei 2017].
- [30] Lake, Eli 2011. Iran's nuclear program helped by China, Russia [online]. <http://www.washingtontimes.com/news/2011/jul/5/irans-nuclear-program-helped-by-china-russia/> [diakses 12 Juni 2017].
- [31] Laub, Zachary 2015. International Sanctions on Iran [online]. <http://www.cfr.org/iran/international-sanctions-iran/p20258> [diakses 10 Mei 2017].
- [32] Lyons, Kate 2015. Iran nuclear talks: timeline [online]. <https://www.theguardian.com/world/2015/apr/02/iran-nuclear-talks-timeline> [diakses 10 Mei 2017].
- [33] Makovsky, Michael dan Blaise Misztal 2011. Obama's Iran policy shifts to containment [online]. https://www.washingtonpost.com/opinions/obamas-iran-policy-shifts-to-containment/2011/12/09/gIQAUD8DjO_story.html?utm_term=.c5e52e379ca4 [diakses 24 Maret 2017].
- [34] Park, John S. dan Cameron Glenn 2015. Iran and China [online].

- <http://iranprimer.usip.org/resource/iran-and-china> [diakses 12 Juni 2017].
- [35] Sanger, David E. dan William J. Broad 2009. U.S. and Allies Warn Iran Over Nuclear Deception [online].
<http://www.nytimes.com/2009/09/26/world/middleeast/26nuke.html?pagewanted=all> [diakses 3 Oktober 2016].
- [36] Sherwood, Harriet dan Jill Treanor 2012. US military chief cautions against Israeli attack on Iran [online].
<https://www.theguardian.com/world/2012/feb/19/us-military-chief-israel-iran> [diakses 13 Juni 2017].
- [37] The Economist 2015. Is this a good deal? [online].
<http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21638915-better-alternativesand-long-way-good-deal> [diakses 11 Juni 2017].
- [38] The White House, 2013a. Remarks As Prepared for Delivery by National Security Advisor Susan E. Rice [online].
<https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/09/09/remarks-prepared-delivery-national-security-advisor-susan-e-rice> [diakses 4 April 2017].
- [39] The White House 2013b. Statement by President Obama on Nowruz [online].
<https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/03/18/statement-president-obama-nowruz> [diakses 1 Mei 2017].
- [40] Toosi, Nahal dan Michael Crowley 2015. John Kerry plays it cool in final push for Iran deal [online].
<http://www.politico.eu/article/iran-talks-enter-tedious-grind-stage/> [diakses 1 Mei 2017].